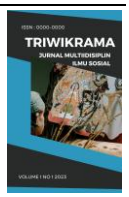
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (ASPD) DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR

Shalinda Cynthia Dewi, M. Zimamul Khaq
UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
shalindacynthia@gmail.com,
zimamulkhaq@ymail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program ASPD menggunakan teori efektivitas William N. Dunn. Melalui metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berjalan secara efektif sebagai jaring pengaman sosial melalui bantuan finansial sebesar Rp300.000 per bulan. Temuan paling signifikan menunjukkan capaian tinggi pada kriteria responsivitas, di mana integrasi layanan terapi fisik berhasil memulihkan fungsi motorik penerima manfaat hingga mampu berjalan kembali. Meskipun demikian, efektivitas sistemik masih menghadapi tantangan pada koordinasi administratif dalam sinkronisasi data, hambatan geografis di wilayah pelosok, serta kecukupan bantuan yang masih bersifat stimulan. Penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi data lintas sektor yang lebih adaptif dan pengembangan strategi transisi menuju kemandirian ekonomi pasca-rehabilitasi fisik untuk menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Disabilitas; Bantuan Sosial; Efektivitas; Program.

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the ASPD program implementation using William N. Dunn's theory of effectiveness. Through a descriptive qualitative method, the results show that the program has operated effectively as a social safety net by providing monthly financial assistance of IDR 300,000. The most significant finding indicates high achievement in the responsiveness criterion, where the integration of physical therapy services has successfully restored the motor functions of recipients with severe disabilities, leading to tangible progress in their ability to walk again. Nevertheless, systemic effectiveness still faces challenges regarding administrative coordination in data synchronization, geographical barriers in remote areas, and the adequacy of the assistance, which remains stimulant in nature. This research recommends more adaptive cross-sectoral data synchronization and the development of transition strategies toward economic independence post-physical rehabilitation to ensure sustainable well-being for persons with disabilities in East Java.

Keywords: Disability; Social Assistance; Effectiveness; Program.

Pendahuluan

Provinsi Jawa Timur memiliki populasi penyandang disabilitas yang cukup besar, mencakup persentase signifikan dari total penduduk. Kelompok ini rentan menghadapi kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga membutuhkan dukungan program perlindungan sosial yang komprehensif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di daerah. Dalam pelaksanaannya, Program ASPD memberikan bantuan sosial berupa uang tunai. Tujuannya adalah membantu pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong kemandirian, serta meningkatkan akses layanan sosial bagi penyandang disabilitas.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Secara spesifik, program ini menyalurkan bantuan finansial sebesar Rp300.000 per bulan yang ditujukan untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Namun, efektivitas perlindungan sosial tidak hanya diukur dari nominal bantuan, melainkan pada ketepatan fungsi pelayanan dalam jangka panjang. Di Provinsi Jawa Timur, populasi penyandang disabilitas merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi antara bantuan tunai dan layanan rehabilitasi.[1]

Implementasi Program ASPD ini didasarkan pada mandat Peraturan Gubernur Jawa Timur yang berupaya mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Program ini menargetkan penyandang disabilitas berat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pemberian bantuan tunai ini diharapkan menjadi jaring pengaman sosial agar kebutuhan dasar seperti nutrisi dan kesehatan minimal tetap terpenuhi.[2] Selain aspek ekonomi, program ini juga menekankan pada pentingnya pendampingan sosial untuk memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan terapi fisik yang memadai. Namun, dalam perjalanannya, tantangan koordinasi lintas sektoral dan validasi data masih menjadi hambatan utama yang memengaruhi tingkat efektivitas kebijakan di lapangan.[3]

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) di Jawa Timur dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas menurut William N. Dunn?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam efektivitas Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Penelitian ini mengambil fokus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Instansi ini dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji bagaimana efektivitas program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam pemberian bantuan finansial dan dukungan layanan terapi sebagai upaya meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup penyandang disabilitas.

Kerangka Teori

Fokus penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas dalam evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan atau

[1] Nurkholis, Sapto Pramono, and Ika Devy Pramudiana. "Impelementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Untuk Mendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Jawa Timur." *SAP - Edisi Khusus Tema Kebijakan* 3, no. 3 (2023): 525–34.
[2] Peran Dinas et al., "Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Ilmiah Pemerintahan" 12 (2024): 71–80.
[3] Nomor Tahun and Estu Kusumawardani, "EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO" 7, no. 1 (2024): 58–69.

program mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan utama dari dilakukannya tindakan tersebut. Selain itu, dalam menilai efektivitas sebuah program bantuan sosial, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh variabel responsivitas, yakni kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan nyata kelompok sasaran di lapangan. Efektivitas bukan sekadar angka distribusi bantuan, melainkan tentang ketepatan program dalam memberikan dampak nyata bagi penurunan beban ekonomi dan perbaikan fungsi fisik penerima manfaat. Faktor pendorong dalam kerangka ini mencakup ketepatan prosedur dan sasaran penerima, sedangkan faktor penghambatnya sering kali meliputi lemahnya koordinasi antar instansi pelaksana serta kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan program.[4]

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan menggunakan pisau analisis teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Evaluasi ini dilakukan melalui lima kriteria utama, yaitu: Efektivitas, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berikut adalah penjabaran mendalam hasil penelitian di lapangan.

A. Efektivitas Program ASPD Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

1. Efektivitas (Effectiveness)

Kriteria efektivitas dalam pandangan William N. Dunn berkaitan dengan apakah sebuah tindakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan utama dari kebijakan tersebut. Dalam mengevaluasi Program ASPD di Jawa Timur, efektivitas tidak hanya diukur secara asumtif, melainkan menggunakan alat ukur kinerja yang konkret, yaitu Ketepatan Sasaran (*Target Compliance*) dan Ketercapaian Tujuan (*Goal Attainment*). Berdasarkan alat ukur ketepatan sasaran, program ini telah mencapai efektivitas yang tinggi karena bantuan secara spesifik ditujukan kepada penyandang disabilitas berat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini diperkuat dengan adanya proses verifikasi faktual oleh pendamping disabilitas yang bertugas memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria tanpa adanya diskriminasi.[5]

Selanjutnya, jika ditinjau dari alat ukur ketercapaian tujuan sebagai jaring pengaman ekonomi, pemberian bantuan sebesar Rp300.000 per bulan secara konsisten telah membantu keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti asupan gizi dan vitamin tambahan .[6] Efektivitas ini juga dibuktikan dengan adanya pendampingan rutin yang memastikan akses layanan kesehatan dan terapi fisik bagi penerima manfaat tetap terpantau. Namun, apabila diukur menggunakan indikator efisiensi administratif, program ini masih memerlukan perbaikan pada aspek sinkronisasi data dari tingkat desa hingga provinsi untuk menghindari keterlambatan pencairan dana. Secara keseluruhan, melalui indikator dampak fisik dan ekonomi, program

[4] Tahun and Kusumawardani, "EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO."
[5] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, ed. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 610.
[6] Y. Fitriani, "Efektivitas Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Analisis Sosial Politik* 4, no. 2 (2020): 96-102

ASPD dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas di Jawa Timur.[7]

2. Kecukupan (Adequacy)

Kriteria kecukupan mempersoalkan seberapa jauh pencapaian hasil kebijakan dapat memecahkan masalah yang ada. Terkait nominal bantuan Rp300.000 per bulan, jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan gizi dasar, program ini memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, apabila dihadapkan pada total biaya hidup penyandang disabilitas berat yang meliputi biaya alat bantu (seperti kursi roda atau alat pendengaran), biaya transportasi khusus, dan kebutuhan medis lainnya nominal tersebut masih bersifat stimulan atau bantuan awal.[8] Meskipun demikian, nilai "kecukupan" dalam program ini tidak hanya diukur dari angka, melainkan dari paket layanan terapi yang disediakan. Bagi banyak keluarga, akses terhadap tenaga terapis profesional merupakan bentuk kecukupan yang jauh lebih berharga daripada bantuan uang tunai semata, karena layanan ini sangat mahal jika diakses secara mandiri. Program ASPD berhasil mengisi celah kebutuhan layanan rehabilitasi yang selama ini sulit dijangkau oleh keluarga miskin di pelosok Jawa Timur.

3. Perataan (Equity)

Perataan berhubungan dengan distribusi manfaat secara adil kepada berbagai kelompok sasaran. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah berupaya melakukan pemerataan jangkauan Program ASPD ke 38 Kabupaten/Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan, tetapi telah menyentuh wilayah perdesaan. Tantangan dalam aspek perataan ini adalah masalah *update* data. Masih ditemukan adanya disparitas informasi antara masyarakat yang proaktif mencari informasi dengan mereka yang terisolasi secara geografis. Keadilan dalam program ini diupayakan melalui peran pendamping disabilitas yang bertugas menjemput bola, melakukan verifikasi faktual di lapangan, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas berat yang memenuhi kriteria benar-benar masuk dalam daftar penerima manfaat tanpa ada diskriminasi.[9]

4. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu menanggapi kebutuhan nyata dan preferensi dari kelompok sasaran. Pada poin inilah ditemukan keberhasilan paling gemilang dan nyata dari Program ASPD. Penelitian ini menemukan bahwa program ASPD sangat responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi fisik penyandang disabilitas berat. Salah satu temuan yang sangat menyentuh di lapangan adalah adanya kemajuan fisik yang luar biasa pada beberapa penerima manfaat. Berkat akses terapi rutin dan latihan motorik yang difasilitasi oleh program ini, penyandang disabilitas berat yang sebelumnya hanya mampu terbaring lemah atau

[7] Nurkholis, Sapto Pramono, dan Ika Devy Pramudiana, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Untuk Mendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Administrasi Publik* (2023): 525–534.
[8] Kemiskinan et al., "Efektivitas Kebijakan Pahlawan Ekonomi Guna Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di Kota Surabaya Aditya Wanda Rahmansyah S1 Ilmu Administrasi Negara , Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Galih Wahyu Pradana , S . AP ., M . Si . S1 Ilmu Administrasi Negara , Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya."
[9] Tahun and Kusumawardani, "EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO."

duduk di kursi roda tanpa kemampuan gerak, kini menunjukkan kemajuan nyata bahkan hingga mampu berjalan kembali.

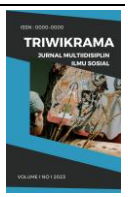
Kemajuan ini merupakan bukti bahwa dukungan program yang mengombinasikan asupan gizi (dari dana tunai) dengan stimulasi fisik (dari terapi) mampu memberikan dampak transformatif. Hal ini bukan hanya meningkatkan kemandirian fisik individu tersebut, tetapi juga mengangkat moral dan semangat psikologis pihak keluarga. Respon positif dari masyarakat terhadap adanya perubahan fisik penerima manfaat ini menunjukkan bahwa program ASPD telah menyentuh akar permasalahan yang paling mendasar, yaitu harga diri dan kemandirian penyandang disabilitas.

5. Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan Ketepatan menilai apakah tujuan-tujuan yang dicapai benar-benar berharga atau berguna bagi sasaran. Program ASPD dinilai sangat tepat sasaran karena difokuskan pada penyandang disabilitas berat yang secara ekonomi masuk dalam kategori kurang mampu. Pemilihan sasaran ini sangat krusial karena kelompok inilah yang paling rentan mengalami eksklusi sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat relevan dengan kebutuhan Jawa Timur untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di kalangan disabilitas. Penggunaan indikator disabilitas berat sebagai syarat utama memastikan bahwa sumber daya pemerintah dialokasikan kepada pihak yang paling membutuhkan.

Secara analitis, jika dikomparasikan dengan teori William N. Dunn mengenai keberlanjutan nilai kebijakan, peneliti menemukan bahwa kriteria ketepatan ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar tetap adaptif dengan kondisi dinamis penerima manfaat. Dalam pengamatan lapangan, terdapat ketidaksesuaian antara kemajuan fisik yang dicapai dengan skema bantuan yang diberikan; ketika seorang penerima manfaat telah mengalami kemajuan fisik signifikan hingga mampu berjalan dan mandiri berkat layanan terapi, bantuan yang diberikan masih bersifat konsumtif semata. Seharusnya, sejalan dengan prinsip ketepatan yang berorientasi pada hasil jangka panjang, kebijakan ini tidak boleh berhenti pada bantuan stimulan, melainkan harus mulai mengintegrasikan strategi transisi menuju pemberdayaan ekonomi atau kemandirian ekonomi pasca rehabilitasi fisik. Hal ini penting agar ketepatan program tidak hanya berhenti pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga pada upaya mengangkat martabat serta kemandirian ekonomi penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



B. Analisis Tantangan dalam Pelaksanaan Program ASPD di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) di Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan kompleks yang memengaruhi optimalisasi capaian kebijakan di lapangan. Tantangan utama terletak pada koordinasi struktural dan validasi data penerima manfaat yang bersifat dinamis. Ketidakakuratan data sering kali memicu terjadinya kesalahan sasaran (*inclusion and exclusion error*), di mana proses pemutakhiran data dari tingkat bawah ke tingkat provinsi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menghambat ketepatan waktu penyaluran bantuan. Fenomena ini selaras dengan evaluasi kebijakan sosial lainnya yang menunjukkan bahwa sinkronisasi administrasi sering menjadi faktor penghambat utama dalam distribusi bantuan pemerintah.

Selain masalah administrasi, hambatan geografis di wilayah Jawa Timur yang luas menyulitkan pemerataan akses layanan terapi fisik, terutama bagi penyandang disabilitas yang berada di wilayah pelosok dan jauh dari pusat layanan kesehatan. Dari sisi kecukupan, bantuan sebesar Rp300.000 per bulan masih dipandang sebagai bantuan stimulan yang belum mampu menutup seluruh biaya operasional perawatan disabilitas berat, seperti kebutuhan alat bantu medis dan transportasi khusus. Lemahnya pengawasan di tingkat akar rumput juga menyebabkan pemanfaatan bantuan terkadang belum terintegrasi secara maksimal dengan upaya pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif keluarga untuk menjamin keberlanjutan dampak positif program, terutama bagi mereka yang telah menunjukkan kemajuan fisik signifikan agar dapat melangkah menuju kemandirian ekonomi.

Kesimpulan

1. Efektivitas Program ASPD Menurut Teori William N. Dunn Pelaksanaan Program ASPD di Jawa Timur dinilai telah berjalan secara efektif sebagai jaring pengaman sosial bagi penyandang disabilitas berat melalui pemberian bantuan finansial sebesar Rp300.000 per bulan. Berdasarkan alat ukur Ketepatan Sasaran (Target Compliance), program ini berhasil menjangkau kelompok kemiskinan ekstrem melalui proses verifikasi faktual yang ketat. Capaian paling signifikan ditemukan pada kriteria Responsivitas, di mana integrasi layanan terapi fisik mampu memberikan dampak transformatif berupa pemulihan fungsi motorik penerima manfaat hingga mampu berjalan kembali. Namun, dari aspek Ketepatan (Appropriateness), masih terdapat ketidaksesuaian antara kemajuan fisik penerima dengan skema bantuan yang ada, sehingga diperlukan transisi dari bantuan konsumtif menuju strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

2. Tantangan dalam Pelaksanaan Program ASPD Tantangan utama dalam pelaksanaan program ini terletak pada hambatan koordinasi struktural dan sinkronisasi data lintas sektor, yang sering kali memicu keterlambatan administrasi serta kesalahan sasaran (inclusion and exclusion error). Selain itu, hambatan geografis di wilayah pelosok Jawa Timur menyulitkan pemerataan akses layanan rehabilitasi fisik bagi seluruh penerima manfaat secara adil. Dari sisi finansial, nominal bantuan saat ini masih dipandang sebagai bantuan stimulan yang belum mampu menutupi seluruh biaya operasional perawatan disabilitas berat, seperti kebutuhan alat bantu medis dan transportasi khusus. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang menekankan pada validasi data dinamis dan penguatan partisipasi keluarga sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dampak program.

Daftar Pustaka

Dinas, Peran, Sosial Provinsi, Jawa Timur, Program Asistensi, and Sosial Penyandang. "Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Ilmiah Pemerintahan" 12 (2024): 71–80.

Kemiskinan, Abstrak, Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, Kota Surabaya, Kota Surabaya, Mengetahui Efektivitas, et al. "Efektivitas Kebijakan Pahlawan Ekonomi Guna Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di Kota Surabaya Aditya Wanda Rahmansyah S1 Ilmu Administrasi Negara , Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Galih Wahyu Pradana , S . AP ., M . Si . S1 Ilmu Administrasi Negara , Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya," 2018.

Tahun, Nomor, and Estu Kusumawardani. "EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO" 7, no. 1 (2024): 58–69.

Nurkholis, Sapto Pramono, and Ika Devy Pramudiana. "Impelementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Untuk Mendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Jawa Timur (2023): 525–34.

Fitriani, Y. (2020). Efektivitas Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, *4*(2), 96-102.

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rahmansyah, A. W., & Pradana, G. W. (2018). Efektivitas Kebijakan Pahlawan Ekonomi Guna Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di Kota Surabaya. *Publika*, 6(1).